

ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN UNIVERSITAS HALU OLEO

¹Abdul Hasan, dan ²Ulfa Matoka

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo

²Staf Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo

Email: abdulhasan573@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to obtain information on gender equality in Haluoleo University. Secondary data were obtained from the Personnel and Finance Board across the Faculty/Program and Technical Services Unit-Information Technology Haluoleo University in 2015 period. The research used Gender Analysis Pathway. The result show that Halu Oleo University have gender bias. The rate of participation and access of men higer than women in the institutional elements such as students, official structurally of faculty and administrative staff, except for Faculty of Pharmacy and Public Health Faculty.

Keywords: *gender, bias, equality*

1. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 telah melaksanakan konferensi tingkat tinggi untuk mewujudkan komitmen dengan *Milenium Development Goals* (MDGs). Deklarasi ini MDGs telah mengeluarkan delapan komitmen yakni: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2. Memenuhi pendidikan dasar untuk semua, 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4. Menurunkan angka kematian balita, 5. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu melahirkan, 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain, 7. Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Komitmen MDGs ini telah jelas dari delapan poin yang ada, poin ke tiga telah menjadi perhatian dunia yaitu tentang permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Menindaklanjuti komitmen MDGs, pemerintah Indonesia telah mengambil satu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender yakni melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming (GM)*. Strategi ini di laksanakan dengan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 15 tahun 2008, Tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. Melalui strategi ini di harapkan semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Indonesia maupun di daerah berperspektif gender sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang telah mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah setempat guna menindaklanjuti

permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang pengarusutamaan gender di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, dan tanggung jawab, serta untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan, pemerintah setempat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DUK dan KB Sultra telah menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) No. 9 Tahun 2013 tentang pengarusutamaan gender (PUG) di kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Sedangkan di Universitas Halu Oleo (UHO), pihak Universitas tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga mendukung adanya kesetaraan gender dan perlindungan anak, melalui Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSG-PA) UHO. Rektor UHO Prof. H. Usman Rianse.,MS mengungkapkan pihaknya selalu mendukung PSG-PA UHO dalam mengimplementasikan berbagai program kerja, dengan harapan program kerja yang ditetapkan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Ketua PSG-PA UHO, Dra. Yoo Eka Kansil, M.Pd., menyampaikan harus ada upaya meminimalkan dan berupaya menghapus ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat baik pada lingkungan formal ataupun non formal. Maka PSG-PA UHO, berbenah diri untuk terus melakukan kegiatan dengan mengembangkan program pembangunan, dengan pengarusutamaan gender sebagai strategi yang berkelanjutan, dan bermanfaat untuk pengembangan program melalui advokasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di segala sektor baik di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berprespektif gender.

Meskipun Universitas Halu Oleo telah mendukung kesetaraan gender itu terjadi di tingkat lokal, Nasional dan Internasional tetapi pada kenyataannya berdasarkan isu yang beredar bahwa khususnya pada kelembagaan Universitas Halu Oleo masih terjadi kesenjangan gender (*gap gender*) di mana hal ini menyebabkan atau menimbulkan opini publik yang berbeda-beda. Menurut Kate young (1987), bahwa kegagalan dari banyaknya perencanaan pembangunan dan implementasinya di sebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat terutama kaum perempuan dalam perencanaan dan dalam proses kebijakan itu sendiri. Untuk menggambarkan kesetaraan gender itu terjadi dalam penguatan kelembagaan pada perguruan tinggi Universitas Halu Oleo, maka dianggap perlu untuk mengetahuinya serta membandingkan peran laki-laki dan perempuan pada Perguruan Tinggi tersebut. Akan tetapi penelitian akan di batasi dalam menggambarkan kesetaraan gender pada kelembagaan Universitas Halu Oleo dari segi tingkat partisipasi dan akses dari unsur-unsur kelembagaan Universitas Halu Oleo, yakni: Unsur Mahasiswa, Dosen, Pegawai Administrasi, dan pada Jabatan Struktural.

2. Kajian Literatur

Teori Dasar Tentang Gender

Teori Kodrat Alam adalah, Menurut teori ini perbedaan biologis yang membedakan jenis kelamin dalam memandang gender (Suryadi dan Idris, 2004). Teori ini dibagi menjadi dua yaitu: (a) Teori Nature merupakan teori yang memandang perbedaan gender sebagai kodrat alam yang tidak perlu dipermasalahkan. (b)Teori Nurture merupakan teori yang lebih memandang perbedaan gender sebagai hasil rekayasa budaya dan bukan kodrati, sehingga perbedaan gender tidak berlaku secara universal dan dapat dipertukarkan. (c)Teori kebudayaan adalah teori yang memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya (Suryadi dan Idris, 2004). Menurut teori

ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatihkan. (d) Dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (Suryadi dan Idris, 2004). (e) Teori Evolusi adalah, menurut teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-menerus tanpa berhenti.

Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Konsep Gender dalam perencanaan pembangunan di berbagai bidang sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, baik pada tataran praktis maupun pada aspek yuridis. Hal ini untuk mendapatkan kepastian apakah hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 (Matoka, 2004). World Bank menyebutkan bahwa, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: pertama, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional dan lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan masyarakat. Dari studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Maka dari itu dipergunakanlah pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan Gender and Development (GAD), suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki dan sebaliknya sebagai pengganti terhadap paradigma pembangunan Women In Development (WID) (Matoka 2004).

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. echols dan Hassan Sadhily, 1983). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Menurut Kantor Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP), konsep gender yaitu : mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan di bebaskan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan di antara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan femininitas.

Diskriminasi Gender

Menurut Matoka (2004) hasil riset yang dilakukan oleh *Women Word Study* tahun 1985 diskriminasi gender telah menyebabkan kerugian bagi perencanaan pembangunan di berbagai negara di dunia, dimana investasi pembangunan banyak mengalir ketempat yang tidak tepat. Oleh sebab itu Pengarus Utama Gender (PUG) adalah suatu strategi penilaian dari setiap rencana aksi bagi perempuan dan laki-laki mencakup peraturan, kebijakan atau program pada seluruh bidang disemua tingkatan (Dewan Ekonomi PBB, 1997). Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 tahun 2000, banyak cara-cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dalam program-programnya, khususnya di lingkungan wilayahnya. Kebijakan-kebijakan yang ada telah banyak berorientasi pada Pengarus Utama Gender (PUG), sehingga cukup banyak pula penyempurnaan atau perubahan aturan-aturan perundangan di daerah yang tidak bias gender dan mengandung diskriminasi pada perempuan. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan. Ada beberapa indikator diskriminasi gender yang terjadi di suatu negara maupun daerah, yaitu:

1. Marjinalisasi adalah penyingkiran yang terjadi pada perempuan dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hukum.
2. Subordinasi artinya penaklukan atau diposisikan setelah kaum laki-laki.
3. Stereotip negatif yaitu pencitraan negatif terhadap perempuan, seperti cengeng, penggoda, sumber kriminalitas, yang berujung pada berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.
4. Beban ganda yaitu kesempatan perempuan untuk bekerja diluar rumah tidak mengurangi kerjanya sebagai pekerja domestik.
5. Kekerasan terhadap perempuan, dapat berupa kekerasan secara verbal (kekerasan fisik) maupun non-verbal (kekerasan secara psikis).

2.1. Dasar Hukum Gender

Dasar hukum untuk jaminan terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di wujudkan dalam beberapa kesepakatan internasional maupun kesepakatan nasional antara lain :

1. Amandemen UUD 1945, Pasal 28 B ayat (1) & Pasal 31 ayat (1)
2. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender
4. Perpres No.7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JM) Tahun 2004-2009
5. Hasil Kesepakatan Dunia tentang: *Education for All, Convention on The Right of Child, Mellenium Development Goals, Word Summit on Sustainable Development*

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan juga pada Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hal tersebut menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Indonesia secara tegas memberikan jaminan kepada semua warga negara tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya serta mempunyai kedudukan yang sama.

3. Metode Penelitian

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, periode 2015 yang diperoleh dari direktory Bagian Keuangan dan Kepegawaian fakultas/program dalam lingkup Universitas Halu Oleo. Data sekunder adalah data terpilah gender meliputi jumlah partisipasi laki-laki dan Perempuan yang ada pada kelembagaan Universitas Halu Oleo, yaitu data tentang jumlah: 1) Mahasiswa, 2) Dosen, 3) Pegawai Administrasi, dan 4) Pejabat Struktural pada seluruh fakultas yang berada pada lingkup Kelembagaan Universitas Haluoleo yaitu :

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
4. Fakultas Pertanian(FP)
5. Fakultas Teknik (FT)
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
7. Fakultas Hukum (FH)
8. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
9. Fakultas Kesehatan masyarakat (FKM)
10. Fakultas Kedokteran (FK)
11. Fakultas Peternakan (FPT)
12. Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL)
13. Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
14. Fakultas Farmasi (FF)
15. Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP)
16. Fakultas dan Ilmu Teknologi Kebumian (FITK)
17. Program Pendidikan Vokasi(PPV)
18. Program Pascasarjana(PPs)

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka metode yang akan di gunakan adalah Metode Analisis Gender yaitu suatu metode analisis yang bersifat membandingkan dan bukan untuk mengukur. Metode analisis gender merupakan suatu metode yang digunakan oleh para perencana yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dari suatu keadaan menuju pada suatu keadaan yang lebih baik. Teknik analisis yang digunakan disebut dengan Gender Analysis Pathway (GAP). Piranti analisis ini terdiri dari dua tahap analisis yaitu : 1) tahap analisis perspektif gender (data terpilah laki-laki perempuan), 2) tahap integrasi Gender pada kertas kebijakan atau Policy Outlook For Planning (POP), Manfaat dari Gender Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook For Planning (POP), bagi perencana untuk mendapatkan kepastian hasil pembangunan dapat dinikmati secara setara adil dan berkesinambungan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi tujuan dan/atau sasaran data
2. Menyajikan data kuantitatif yang terpilah laki-laki dan perempuan
3. Menganalisis data dan mengidentifikasi kesenjangan gender (GAP)
4. Identifikasi masalah-masalah gender (gender issue).
5. Reformulasi Kebijakan dengan mengintegrasikan hasil analisis gender.

4. Hasil Dan Pembahasan

Secara konseptual kesetaraan gender diukur berdasarkan tingkat (1) partisipasi, (2) akses, (3) kontrol dan (4) manfaat. Namun demikian dalam penelitian ini dibatasi pada kesetaraan gender berdasarkan tingkat partisipasi dan akses laki-laki dan perempuan pada kelembagaan Universitas Haluoleo Kendari. Kesetaraan Gender pada Kelembagaan Universitas Haluoleo dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu (1) mahasiswa, (2) dosen, (3) pegawai, dan (4) pejabat struktural.

Gender Analysis Pathway merupakan alat analisis yang dapat di gunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, kegiatan pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan dibidang pendidikan tinggi dalam hal ini Universitas Haluoleo Kendari. Melalui Gender Analysis Pathway (GAP) model, para perencana kebijakan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus dapat mereformulasi kembali kebijakan agar memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Bappenas, 2001). Berdasarkan pada hasil penelitian maka dengan menggunakan model Gender Analysis Pathway (GAP) ditemukan 3 hal sebagai berikut : 1) Isue Gender, 2) Analisis Situasi, 3) Reformulasi Kebijakan.

Isue Gender

Hasil penelitian lapangan berdasarkan kompilasi data terpilah gender (lensa Gender) pada unsur-unsur kelembagaan di Universitas Halu Oleo yaitu : mahasiswa, dosen, pegawai dan pejabat struktural menginformasikan suatu kondisi (isue gender) : Secara keseluruhan tingkat partisipasi dan akses lebih didominasi oleh Laki-laki dibandingkan perempuan atau Bias Gender. Kondisi ini merupakan prakondisi yang kurang menguntungkan dalam pencapaian tujuan penguatan kelembagaan di Universitas haluoleo.

Analisis Situasi

Berdasarkan data terpilah gender ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Bias gender terutama pada Fakultas dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang terbanyak yaitu Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial politik (FISIP), serta Program Pasca sarjana.
- b. Fakultas Pertanian termasuk 5 Fakultas bentukan baru yang dilebur dari fakultas tersebut yaitu fakultas Peternakan (FPt), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (FHIL), Fakultas Teknologi dan Ilmu Pertanian((FTIP) serta Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian (FITK) merupakan penyumbang terbesar terjadinya kondisi bias gender pada Kelembagaan Universitas Haluoleo. Pada unsur mahasiswa disparitas tertinggi pada Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan (70,02), pada unsur Dosen disparitas tertinggi berada pada Fakultas Peternakan (51,72) demikian juga pada unsur pejabat struktural fakultas ini mendominasi bias gender dengan disparitas (83,34).
- c. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas Farmasi (FF) menunjukkan responsivitas gender yang konsisten baik pada unsur mahasiswa maupun dosen

- d. Suatu prakondisi yang baik ditunjukkan oleh bias gender yang kecil terutama pada kinerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (4,9) Kedokteran (3,36) dan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (4,68)
- e. Pada level pendidikan yang lebih tinggi S2 dan S3 pada Program Pasca Sarjana bias gender pada unsur mahasiswa menjadi semakin kecil atau tingkat disparitas gender pada pascasarjana sebesar (8,68)
- f. Pada unsur pegawai administrasi kondisi bias gender merata pada semua fakultas.
- g. Hasil telaah Visi Misi Universitas Haluoleo beserta tujuan yang ingin dicapai termasuk faktor pendorong dan penghambat pencapaian Visi Misi lebih bersifat netral gender. Artinya perumusan visi misi belum didasarkan pada analisis situasi yang ada. Perumusan rencana strategi belum berangkat dari *Capacity Building* dengan *framework* yang diarahkan untuk memfasilitasi terlaksananya program yang berwawasan gender. Rencana aksi untuk penguatan kelembagaan terkesan dilakukan secara terburu-buru. Produk rencana belum menjadikan isue gender sebagai *mainstreaming* dalam pencapaian tujuan penguatan kelembagaan. Dengan kata lain tidak berangkat dari identifikasi isue gender hasil studi yang bersifat kualitatif dengan metode yang partisipatif, umumnya disusun berbasis data statistik yang terbatas (indikator yang dibutuhkan perencana tidak/belum terpilah). Akibatnya walaupun belanja publik secara integral meningkatkan kesetaraan pemberdayaan perempuan (Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah secara yuridis (UU, INPRES, Peraturan Pemerintah, PERDA dll) sebagai wujud implementasi Good Government, namun belum secara optimal memperbaiki kondisi perempuan pada kelembagaan Universitas Haluoleo sebagai perguruan Tinggi Terbesar di Sulawesi Tenggara.

Reformulasi Kebijakan

Berdasarkan pada analisis situasi tersebut diatas maka diperlukan Reformulasi Kebijakan dalam pencapaian Visi Misi yang diinginkan dimasa mendatang.

a. Visi dan Misi Hasil Reformulasi

Visi Universitas Halu Oleo 2019 menjadi perguruan tinggi unggul di Indonesia, bermartabat, berbudaya akademik, menghasilkan SDM yang setara antara laki-laki dan Perempuan cerdas komprehensif dalam pengembangan pesisir, kelautan, dan perdesaan. Visi Universitas Halu Oleo 2045: *menjadi 250 perguruan tinggi terdepan di dunia dalam IPTEKS untuk benua maritim, harmonisasi dan kesejahteraan berkelanjutan dan seimbang. Misi Universitas Halu Oleo adalah sebagai berikut:*

1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing secara seimbang antara laki-laki dan perempuan dan beradaptasi dalam kancah global, terutama dibidang Kesehatan Masyarakat dan Farmasi, Ilmu Pengetahuan Alam, Kedokteran, Ilmu Teknologi Pertanian serta Kehutanan dan ilmu Lingkungan.
2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan hak paten
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS
4. Menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel berbasis data gender sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan

5. Mengembangkan potensi mahasiswa secara seimbang antara laki-laki dan perempuan dibidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan, untuk membangun citra Universitas Haluoleo di tingkat nasional dan internasional
6. Mengembangkan lingkungan universitas yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin kepastian layanan kepada *stakeholders*

Tujuan dari visi-misi universitas Halu Oleo tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin kepastian layanan kepada *stakeholders*
 2. Tercapai peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian yang setara antara laki-laki dan perempuan agar memiliki daya saing
 3. Tersedia sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
 4. Tercapai peningkatan prestasi mahasiswa secara setara antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan penalaran, seni dan budaya, kewirausahaan, serta olahraga di tingkat nasional
 5. Tersedia sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan lingkungan
 6. Terbangunnya sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara menyeluruh di fakultas/lembaga
- b. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Keberhasilan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, dibutuhkan lingkungan strategis yang kondusif. Oleh karena itu, maka lingkungan internal dan eksternal sebagai lingkungan strategis harus dikelola secara profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Faktor internal merupakan faktor penentu keberhasilan yang dapat dikendalikan (*controllable*). Sementara faktor eksternal sebagai faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable*) oleh Universitas Halu Oleo. Faktor-faktor penentu keberhasilan UHO adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai;
2. Keseimbangan antara jumlah mahasiswa dan lulusan baik laki-laki maupun perempuan;
3. Adanya komitmen *stakeholders* tentang penerapan manajemen Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien dan adanya jaminan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak semua elemen;
4. Dana pembangunan bidang pendidikan dan berbagai sumberdana lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi Universitas;
5. Prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap elemen di perguruan Tinggi Universitas Halu Oleo tersedia dengan baik;
6. Jaringan (*network*) yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta kerjasama lainnya.
7. Adanya sistem pengawasan dan monitoring yang transparan, akuntabel dan responsible baik eksternal maupun internal audit.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan Menurut Fakultas di Universitas Haluoleo Tahun 2015-2016

NO	FAKULTAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE		Dispa- ritas	Ket.
		Lk	Pr		Lk	Pr		
1	FKIP	2738	2323	5061	54,10	45,90	-8,2	L>P
2	FEB	1337	1051	2388	55,99	44,01	-11,98	L>P
3	FISIP	2620	1136	3756	69,76	30,24	-39,52	L>P
4	FP	1009	562	1571	64,23	35,77	-28,53	L>P
5	FT	1312	269	1581	82,99	17,01	-65,98	L>P
6	MIPA	1272	1153	2425	52,45	47,55	-4,9	L>P
7	FH	929	166	1095	84,84	15,16	-69,68	L>P
8	FPIK	816	328	1144	71,33	28,67	-42,66	L>P
9	FKM	211	380	591	35,70	64,30	31,6	P>L
10	FK	323	302	625	51,68	48,32	-3,36	L>P
11	FPt	345	135	480	71,88	28,12	-43,76	L>P
12	FHIL	465	82	547	85,01	14,99	-70,02	L>P
13	FIB	661	339	1000	66,10	33,90	-32,2	L>P
14	FF	59	150	209	28,23	71,77	43,54	P>L
15	FTIP	112	102	214	52,34	47,66	-4,68	L>P
16	FITK	198	72	270	73,33	26,67	-46,66	L>P
17	VOKASI	533	107	640	83,28	16,72	-66,56	L>P
18	SARJANA	926	778	1704	54,34	45,66	-8,68	L>P
19	JUMLAH	15866	9435	25301	62,71	37,29	-25,42	L>P

Sumber: UPT.TIK UHO

Berdasarkan tabel tersebut dapat di lihat bahwa pada unsur mahasiswa, laki-laki masih mendominasi baik partisipasi maupun akses pada kelembagaan Universitas Haluoleo Kendari sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara. Namun terdapat informasi yang berbeda pada dua fakultas yang ada di Universitas Haluoleo yaitu pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Farmasi, dimana pada kedua fakultas tersebut, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responsifitas gender terjadi di dua fakultas itu, namun secara umum di kelembagaan Universitas Haluoleo, di lihat dari segi akses dan tingkat partisipasi pada unsur mahasiswa, tingkat disparitas gender yang terjadi yaitu sebesar (25,42) atau laki-laki lebih mendominasi daripada laki-laki.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan alat analisis GAP (*Gender Analysis Pathway*), ditemukan 3 hal yaitu : (1) Issue gender dengan berdasarkan kompilasi data terpilah gender (lensa gender) pada Unsur-unsur kelembagaan Universitas Haluoleo (Mahasiswa, dosen, pegawai administrasi, dan pejabat Sruktural) menginformasikan bahwa kondisi (issue gender) secara keseluruhan baik dari tingkat partisipasi maupun akses lebih di dominasi oleh kaum laki-laki; (2) Hasil Analisis Situasi menunjukkan: (a) bias gender terutama pada jumlah mahasiswa dan dosen terbanyak yaitu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta pada program Pascasarjana, (b) Penyumbang terbesar terjadinya kondisi bias gender pada kelembagaan Universitas Haluoleo adalah F.Pertanian, F.Peternakan, F.Perikanan dan Ilmu Kelautan, F.Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, F.Illmu dan Teknologi Kebumihan, sedangkan pada Unsur mahasiswa disparitas tertinggi yaitu pada F. Kehutanan (70,02), pada unsur dosen berada pada F.Peternakan (51,72)

demikian juga pada unsur pejabat struktural F.Peternakan, tingkat disparitas gender (83,34); (3) Reformulasi kebijakan berdasarkan analisis situasi maka di perlukan reformulasi kebijakan visi misi di masa mendatang yang lebih responsif gender serta akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Universitas Halu Oleo masih bias gender atau belum responsif Gender. Kecuali pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dan Fakultas Farmasi (FF) lebih responsif gender.

Daftar Pustaka

- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia. Cet. XII.
- Eko bambang subiyantoro, (juni 2005) *sensitivitas gender kebijakan pemerintahan SBY*.
- Fithriyah, dkk. Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun anggaran 2013 (*pembangunan kesetaraan gender/background studyRPJMN III dari 2015-2019*).
- Fitriandoyo, Hendy (2014), “*Pemantapan implementasi pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*”.
- Gender/Profil Universitas _ *Universitas Halu Oleo _ Kendari _ Sulawesi Tenggara.htm*
- Hanum, Farida dan Wibawa, lutfi, 2010, *analisis kesetaraan gender di pemerintahan kabupaten sleman DIY*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ichwayudi Budi, 2013, *kesetaraan gender di lembaga pendidikan islam pasuruan*, Institut agama islam negeri (iain), lembaga penelitian, surabaya.
- Marhumah, 2011, *Konstruksi gender, hegemoni, kekuasaan, dan lembaga kependidikan*, KARSA, Vol. 19 No. 2. UIN, Yogyakarta.
- Marzuki, 2007. *Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender*, Pkn dan hukum FISE UNY.
- Matoka, Ulfa. 1996. *Metode Penelitian gender*, pusat penelitian gender universitas haluoleo, pokja diknas sultra.
- Matoka, Ulfa. 2004. *Peran strategis perempuan dalam kebangkitan bangsa* , kendari, Sulawesi tenggara.
- Matoka, Ulfa. 2004. *perencanaan berperspektif gender*, pusat studi gender unhalu, pokja gender diknas sultra kendari sulawesi tenggara.
- Megawangi, Ratna (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Mufidah ch, *isla*,2011 *strategi implementasi pengarusutamaan gender bidang pendidikan*, Al-Tahrir Vol.11, No. 2 UIN, Malang.
- Nugroho, Riant. 2008. *Buku Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 197.
- Nursini, dkk, *desain model penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan di kabupaten gowa dan jeneponto sulawesi selatan (jurnal 561/Ekonomi Pembangunan Tema: Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa)*. Kabupaten gowa dan jeneponto, sulawesi selatan
- Pujiati, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (*Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, Hlm.46-61 Kausalitas Antara Fundamental Ekonomi Daerah Dan Peran Wanita Dalam Pembangunan*)

RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014, *Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan Gender*.

Sulistiowati, R, dkk, 2012, *evaluasi kebijakan responsif gender bidang pendidikan di Propinsi Lampung*, (Universitas Lampung).

<http://logikailmiah.blogspot.co.id/2013/09/jurnal-perempuan-dan-gender-ii.html>
diakses pada tgl 5 oktober 2015

<http://mardianpratama10.blogspot.co.id/2012/10/definisi-kelembagaan.html> diakses
pada tgl 5 oktober 2015

<http://www.gudangmateri.com/2011/01/pengertian-gender.html> diakses pada tgl 5
oktober 2015

<http://www.jurnalperempuan.org/undang-undang-kesetaraan-dan-keadilan-gender.html>
diakses pada tgl 5 oktober 2015

[http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-
dalamkebijakan-pembangunan/](http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalamkebijakan-pembangunan/) diakses pada tgl 5 oktober 2015